

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini lebih menekankan pada aspek teknis pengelolaan keuangan daerah, seperti prosedur penyusunan anggaran, pengeluaran, dan pencatatan laporan keuangan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kinerja keuangan yang baik memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan operasional yang mendukung tugas dan fungsi mereka. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Mengkaji kinerja keuangan memungkinkan evaluasi terhadap seberapa efisien dan efektif penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dalam sektor publik, terutama di instansi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat, kinerja keuangan yang baik berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan, seperti kecepatan respon terhadap permasalahan sosial di tengah masyarakat.

Kemampuan suatu entitas untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, terlihat dari kinerja keuangannya. Hal tersebut biasanya diukur melalui analisis laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Indikator kinerja keuangan yang umum meliputi rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan

pengelolaan dana yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam sektor publik, kinerja keuangan sering kali dikaitkan dengan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, sementara di sektor swasta, fokusnya adalah pada profitabilitas dan pengelolaan arus kas yang baik.

Permasalahan dalam kinerja keuangan daerah dapat timbul dari berbagai aspek, seperti alokasi anggaran, perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengendalian keuangan, serta transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran yang tidak efisien dan tidak efektif sering kali terjadi, ditandai dengan rendahnya alokasi dan penyerapan anggaran, belanja yang tidak sesuai prioritas, serta adanya kebocoran anggaran.

Faktor yang sangat menentukan kinerja keuangan salah satunya adalah alokasi anggaran. Alokasi yang terencana dengan baik memungkinkan organisasi untuk memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas. Efisiensi ini tercermin dalam rasio biaya operasi yang rendah, dimana dana digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Misalnya, pengeluaran yang difokuskan pada kebutuhan prioritas memungkinkan penghematan yang berdampak positif pada kinerja keuangan.

Prinsipnya bahwa, alokasi anggaran yang tepat merupakan aspek fundamental dalam pencapaian kinerja keuangan yang baik. Ini tidak hanya mencakup penetapan prioritas dalam anggaran tetapi juga pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Dengan alokasi anggaran yang ketat dan pengawasan yang baik, organisasi dapat mengendalikan biaya yang tidak perlu dan menghindari defisit. Kontrol biaya yang efektif berdampak langsung

pada kesehatan finansial perusahaan dengan mengurangi pemborosan dan menjaga margin keuntungan tetap stabil.

Pramono (2020) menegaskan bahwa alokasi anggaran yang tepat berhubungan erat dengan pencapaian kinerja keuangan yang optimal. Pengalokasian dana yang sesuai dengan kebutuhan prioritas operasional suatu organisasi membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung keberlanjutan program yang diimplementasikan. Sebaliknya, ketika alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan, organisasi cenderung menghadapi pemborosan atau kekurangan dana untuk program penting.

Selain alokasi anggaran, sistem pengendalian internal, menjadi variabel yang ikut menentukan baik tidaknya kinerja keuangan suatu organisasi. Sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan organisasi terletak pada kemampuannya untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan dan penyimpangan. Dengan pengawasan yang kuat, organisasi dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan. Selain itu sistem pengendalian internal mampu meningkatkan keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan yang akurat dan andal memudahkan manajemen untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Dengan sistem pengendalian internal yang baik maka akan mampu meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dalam membantu organisasi mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi yang akan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan.

Studi yang dilakukan oleh Herminingsih (2018) menemukan bahwa organisasi yang memiliki pengendalian internal yang efektif menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang lebih tinggi, serta mengurangi risiko penyalahgunaan

anggaran. Pengendalian internal memungkinkan pemantauan yang ketat terhadap penggunaan dana dan membantu mendeteksi penyimpangan pada tahap awal.

Kompetensi SDM keuangan yang baik memungkinkan personel Satpol PP dan Damkar untuk mengelola anggaran dengan efisien dan efektif, khususnya dalam hal Penyusunan anggaran berbasis kinerja, Pemanfaatan dana untuk kebutuhan operasional dan pelayanan publik, dan pemantauan penggunaan anggaran agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di era digital, kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan, seperti aplikasi e-budgeting atau e-audit, sangat menentukan transparansi dan akuntabilitas keuangan organisasi.

Dalam konteks kinerja keuangan, SDM yang kompeten diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui:

- Pemanfaatan anggaran yang optimal sesuai dengan prioritas program kerja.
- Transparansi dalam pengelolaan dana publik yang meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- Kepatuhan terhadap regulasi keuangan, sehingga menghindari temuan audit negatif.

Pengelolaan dan pengendalian anggaran yang ketat membantu mencegah pemborosan dan memastikan bahwa pengeluaran yang tidak perlu diminimalkan, yang akan berdampak positif pada kesehatan finansial organisasi. Anggaran yang efektif memudahkan proses evaluasi dan pelaporan, sehingga memungkinkan pengawasan terhadap penggunaan dana. Transparansi ini meningkatkan kredibilitas organisasi dan mendukung kinerja keuangan yang sehat.

Sehubungan kompetensi SDM, Fauzan dan Yusuf (2021) dalam penelitiannya tentang *The Impact of Employee Competence on Financial Performance in Local Governments*, menyimpulkan bahwa kompetensi teknis SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian target anggaran. Pemerintah daerah yang memberikan pelatihan rutin tentang sistem pengelolaan keuangan melihat peningkatan signifikan dalam efisiensi keuangan. Widodo dan Santoso (2020), menyimpulkan hasil temuannya bahwa kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan anggaran memengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan. Faktor ini sangat penting untuk organisasi publik yang ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada beberapa organisasi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk unit pemadam kebakaran, dengan hasil bahwa pelatihan teknis keuangan secara berkala berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan.

Provinsi Sulawesi Barat, seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum serta menanggulangi risiko kebakaran. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, Satpol PP dan Damkar memerlukan dukungan keuangan yang memadai serta pengelolaan anggaran yang efektif. Satpol PP dan Damkar sebagai dua entitas dalam Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertanggung jawab terhadap penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan penanggulangan kebakaran. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, diperlukan pengelolaan keuangan yang tepat, terutama dalam alokasi anggaran, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM. Aspek-aspek ini saling terkait dan memiliki dampak langsung terhadap pencapaian kinerja keuangan yang optimal.

Alokasi anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional dan pemeliharaan Satpol PP dan Damkar. Di samping itu, penerapan

sistem pengendalian internal yang kuat dapat mencegah kesalahan atau penyalahgunaan anggaran dan menjaga transparansi serta akuntabilitas keuangan. Efektivitas dalam proses penganggaran juga sangat menentukan agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai prioritas dan kebutuhan operasional kedua instansi ini.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan, terutama dalam memastikan bahwa alokasi anggaran, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM berjalan secara optimal. Alokasi anggaran seringkali menjadi isu kritis karena dana yang tersedia mungkin tidak selalu mencukupi atau tidak dialokasikan sesuai kebutuhan prioritas, yang akhirnya dapat memengaruhi kualitas layanan publik. Selain itu, sistem pengendalian internal yang kurang efektif dapat menyebabkan risiko penyelewengan dana atau ketidakpatuhan terhadap prosedur keuangan yang berlaku. Kompetensi SDM juga penting, mengingat kemampuan atau kapasitas SDM dibidang keuangan menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan agar dapat tepat sasaran bisa berakibat pada pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan dana publik.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh dari alokasi anggaran, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM terhadap kinerja keuangan Satpol PP dan Damkar di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran ketiga faktor tersebut dalam mencapai kinerja keuangan yang baik, serta memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif di tingkat pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Alokasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat ?
3. Apakah Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat ?
4. Apakah Alokasi Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kinerja Keuangan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat.
4. Untuk Menganalisis Pengaruh Simultan Alokasi Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM terhadap Kinerja Keuangan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi teoritis, dan praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur di bidang manajemen keuangan publik, terutama yang berfokus pada pengaruh alokasi anggaran, pengendalian internal, dan Kompetensi SDM terhadap kinerja keuangan lembaga pemerintah daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
2. Hasil penelitian ini dapat memperkuat atau menguji teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di sektor publik, seperti teori anggaran, teori pengendalian internal, dan teori efektivitas organisasi. Penelitian ini bisa memperdalam pemahaman mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja keuangan di lembaga pemerintahan daerah.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin meneliti topik serupa, baik di daerah yang berbeda atau dengan variabel tambahan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan lembaga pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang bagaimana alokasi anggaran yang tepat, pengendalian internal yang kuat, dan penganggaran yang efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan Satpol PP dan Damkar. Dengan

mengetahui pengaruh ketiga variabel tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian dalam alokasi anggaran, sistem pengendalian, dan kompetensi SDM untuk meningkatkan kinerja keuangan instansi.

2. Hasil penelitian ini dapat membantu Satpol PP dan Damkar dalam mengevaluasi praktik-praktik pengelolaan keuangan yang selama ini diterapkan. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dalam hal alokasi anggaran yang lebih efisien, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan Kompetensi SDM untuk menunjang kinerja organisasi dan mencapai target yang lebih optimal.
3. Satpol PP dan Damkar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga

hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian,

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

Bab IV Metode Penelitian,

Membahas variabel penelitian, definisi optimal yang dapat memberikan deskripsi tentang variabel-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian. jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel penelitian serta darimana data tersebut diperoleh, metode pengumpulan data dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, metode analisis yang berisi instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis.

Bab V Hasil Penelitian,

Mendeskripsikan obyek penelitian dan menyajikan data - data deskripsi hasil analisis statistik yang telah dilakukan.

Bab VI Pembahasan,

Membahas hasil - hasil penelitian yang telah diteliti.

Bab VII penutup,

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan, yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan hubungan antara pemilik atau pemegang kepentingan (prinsipal) dan manajemen atau pelaksana (agen). Dalam konteks organisasi pemerintah seperti Satpol PP dan Damkar, kepala daerah bertindak sebagai prinsipal yang mempercayakan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas pada dinas terkait (agen). Efektivitas pengendalian internal dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan.

Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana pengendalian internal dan penganggaran dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana atau ketidakefisienan yang mungkin merugikan kinerja keuangan.

2.1.2 Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Keuangan Daerah merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang meliputi pembiayaan, alokasi, dan penggunaan dana serta sumber daya keuangan lainnya untuk mencapai tujuan dan kebijakan pemerintah daerah secara efisien dan efektif. Tujuan utama dari manajemen keuangan daerah adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Beberapa poin penting tentang manajemen keuangan daerah diantaranya

1. Perencanaan Anggaran

Manajemen keuangan daerah dimulai dengan perencanaan anggaran. Pemerintah daerah harus merencanakan pendapatan dan pengeluaran yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang direncanakan. Proses perencanaan anggaran harus memperhitungkan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

1. Pengorganisasian Sumber Daya Keuangan:

Setelah anggaran direncanakan, sumber daya keuangan harus diorganisasi dengan tepat untuk memastikan dana yang tersedia dialokasikan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah. Ini melibatkan pengaturan sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan struktur organisasi yang tepat.

2. Pengendalian Keuangan:

Pengendalian keuangan adalah bagian penting dari manajemen keuangan daerah untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya keuangan digunakan sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini mencakup pemantauan pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan pencegahan penyelewengan atau pemborosan dana.

3. Akuntabilitas dan Transparansi

Manajemen keuangan daerah harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan memastikan bahwa laporan keuangan daerah disusun secara transparan dan akurat.

4. Pembiayaan Proyek dan Program

Manajemen keuangan daerah berperan dalam pemilihan dan pelaksanaan sumber pembiayaan untuk proyek dan program pemerintah daerah. Hal ini termasuk penggunaan dana internal, pinjaman, dan potensi pendapatan lainnya.

5. Evaluasi Kinerja:

Manajemen keuangan daerah melibatkan evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Evaluasi kinerja dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan lebih lanjut.

6. Peran Profesionalisme:

Manajemen keuangan daerah memerlukan keahlian dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan. Pelibatan tenaga ahli dan profesional keuangan membantu pemerintah daerah mengoptimalkan manajemen keuangannya.

Manajemen keuangan daerah adalah hal yang kompleks dan penting dalam mengelola keuangan publik. Dengan manajemen keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan dana publik digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di tingkat lokal.

2.1.3 Alokasi Anggaran

2.1.3.1. Defenisi Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah proses distribusi sumber daya finansial untuk mendukung kegiatan, proyek, atau departemen dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Alokasi anggaran yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi memiliki dana yang cukup untuk menjalankan

fungsinya secara efektif dan efisien, sambil mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan yang bersifat prioritas tinggi dan keterbatasan sumber daya.

Menurut Mikesell (2011), alokasi anggaran adalah pembagian sumber daya berdasarkan prioritas strategis, di mana anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki nilai signifikan dalam mencapai tujuan organisasi. Wildavsky (1986) menyebut alokasi anggaran sebagai keputusan keuangan yang tidak hanya berfokus pada ketersediaan dana, tetapi juga pada penggunaan yang memenuhi kepentingan publik secara optimal, terutama dalam konteks organisasi pemerintah.

2.1.3.2 Prinsip Alokasi Anggaran

- **Efisiensi dan Efektivitas**

Anggaran harus dialokasikan dengan mempertimbangkan efisiensi (penggunaan sumber daya dengan bijak) dan efektivitas (pencapaian tujuan yang optimal).

- **Akuntabilitas dan Transparansi**

Setiap alokasi anggaran harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menciptakan transparansi serta kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

- **Prioritas**

Alokasi anggaran harus memperhatikan prioritas organisasi, yaitu membiayai kegiatan atau proyek yang memiliki dampak strategis yang paling signifikan.

- **Fleksibilitas**

Anggaran perlu memiliki ruang untuk perubahan atau adaptasi berdasarkan kondisi atau kebutuhan yang tidak terduga selama periode anggaran berjalan.

2.1.3.3 Metode Alokasi Anggaran

- ***Incremental Budgeting (Penganggaran Inkremental)***

Alokasi anggaran berdasarkan anggaran tahun sebelumnya dengan penyesuaian kecil, biasanya digunakan untuk proyek yang sifatnya stabil atau berkelanjutan.

- ***Zero-Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Nol)***

Setiap unit atau departemen mulai dengan anggaran nol, dan setiap item harus dibenarkan sebelum diberikan anggaran. Ini memungkinkan pengalokasian yang lebih ketat sesuai kebutuhan.

- ***Performance-Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja)***

Alokasi didasarkan pada kinerja dan hasil yang diharapkan dari setiap unit, di mana dana dialokasikan untuk kegiatan yang menunjukkan potensi pencapaian tujuan organisasi.

2.1.3.4. Tujuan Alokasi Anggaran

- Mendukung Operasional Organisasi

Memastikan bahwa setiap departemen atau unit memiliki cukup dana untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

- Meningkatkan Kinerja Keuangan

- Dengan alokasi yang tepat, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan dana untuk pencapaian hasil yang maksimal, yang berdampak positif pada kinerja keuangan.

- Pengendalian Biaya

Alokasi anggaran membantu dalam pemantauan dan pengendalian biaya, sehingga dapat mencegah pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

- **Pencapaian Sasaran Strategis**

Alokasi anggaran yang baik memungkinkan organisasi mencapai tujuan strategis, seperti peningkatan pelayanan publik dalam konteks pemerintahan.

2.1.3.5. Tantangan dalam Alokasi Anggaran

Keterbatasan dana sering kali memaksa organisasi untuk menetapkan prioritas dalam alokasi, sehingga tidak semua program atau proyek dapat didanai secara maksimal. Terkadang kondisi atau situasi eksternal yang tidak terduga memengaruhi kebutuhan anggaran, misalnya dalam penanganan bencana alam atau pandemi. Dalam organisasi besar, setiap unit sering kali bersaing untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar, yang bisa menciptakan tantangan dalam distribusi yang adil.

Alokasi anggaran yang efektif sangat penting untuk keberhasilan organisasi, baik dalam sektor publik maupun swasta. Penentuan alokasi anggaran yang cermat tidak hanya mendukung pencapaian tujuan organisasi tetapi juga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Teori lainnya terkait alokasi anggaran yaitu penganggaran publik yang mencakup prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan publik yang efektif, akuntabel, dan transparan. Menurut teori ini, alokasi anggaran yang tepat sangat penting dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Mikesell, 2011). Prinsip ini mendukung analisis mengenai bagaimana efektivitas alokasi

anggaran dapat memengaruhi kinerja keuangan dan operasional Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat. Teori ini juga menjelaskan pentingnya perencanaan yang matang dan pengawasan dalam proses penganggaran agar tujuan organisasi publik dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

2.1.4. Teori Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control Theory*)

2.1.4.1. Defenisi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016), sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2014), sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Menurut Susanto (2013), sistem adalah kumpulan/group dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang oleh manajemen dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi untuk mencapai tujuan utama yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasi organisasi. Menurut Hery (2013), pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan

Teori ini yang berdasarkan pada kerangka kerja COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), menekankan lima komponen utama sistem pengendalian internal: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. COSO berpendapat bahwa pengendalian internal yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dan mencegah kecurangan serta kesalahan dalam laporan keuangan.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, sistem pengendalian internal memiliki lima komponen utama:

1. Lingkungan Pengendalian:

mencakup nilai, budaya, dan perilaku organisasi yang mendukung pengendalian yang baik.

2. Penilaian Risiko

proses untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi.

3. Aktivitas Pengendalian

kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi.

4. Informasi dan Komunikasi

memastikan informasi yang relevan disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam waktu yang tepat.

5. Pemantauan

pemantauan yang terus-menerus atas efektivitas pengendalian internal untuk memastikan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan.

Menurut *Arens, Elder, dan Beasley (2017)*, sistem pengendalian internal bertujuan untuk melindungi aset organisasi, meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, aturan, dan peraturan yang berlaku. Sistem ini juga berfungsi untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau penyimpangan, termasuk kecurangan dalam laporan keuangan.

Dalam organisasi sektor publik, sistem pengendalian internal membantu memastikan akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik, sedangkan di sektor swasta, sistem ini membantu dalam menciptakan kepercayaan pada laporan keuangan dan kinerja organisasi.

Dalam konteks ini, sistem pengendalian internal pada Satpol PP dan Damkar penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan, serta untuk menjaga akuntabilitas dalam laporan keuangan. Implementasi pengendalian internal yang baik dapat berdampak positif pada kinerja keuangan.

2.1.4.2 Indikator Pengendalian Internal

Indikator Pengendalian Internal menurut Mahmudi (2016) adalah:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan Pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan.

2. Penaksiran risiko

Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang (iteratif) untuk mengenali (identifikasi) dan menilai (analisis) risiko atas pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur (misalnya prosedur operasi standar atau SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.

4. Informasi dan komunikasi

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

5. Pemantauan

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk

mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

Selanjutnya unsur-unsur Pengendalian Internal menurut Mulyadi (2016) ada 4 unsur, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan

perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.1.5. Kompetensi SDM

2.1.5.1 Defenisi Kompetensi SDM

Boyatzis (1982), Boyatzis mendefinisikan kompetensi sebagai "karakteristik mendasar dari seorang individu yang terkait langsung dengan keberhasilan kerja." Dalam konteks SDM keuangan, kompetensi mencakup kemampuan teknis, perilaku, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan secara efektif. Spencer dan Spencer (1993), mendeskripsikan kompetensi adalah "karakteristik mendalam seseorang yang memengaruhi kinerjanya di tempat kerja." Dalam konteks SDM keuangan, hal ini mencakup keahlian seperti analisis laporan keuangan, manajemen risiko, dan pemahaman tentang peraturan keuangan. Selanjutnya Mangkunegara (2005), menjelaskan bahwa kompetensi adalah "faktor dasar individu yang memengaruhi cara kerja seseorang, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap." Dalam hal SDM keuangan, hal ini merujuk pada kemampuan untuk mengelola anggaran, memahami akuntansi, serta memiliki sikap integritas dan akuntabilitas. Sedarmayanti (2007) menyatakan bahwa kompetensi adalah "kesesuaian antara kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan." Kompetensi SDM keuangan mencakup penguasaan pada teknologi keuangan, pemahaman tentang strategi bisnis, serta kemampuan membuat keputusan berbasis data.

Menurut Investopedia (2021) SDM Keuangan (*Financial Human Resource Management*) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia yang terkait dengan fungsi keuangan organisasi. SDM Keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, terlatih, dan terampil dalam mengelola aspek keuangan organisasi dengan efisien dan efektif.

SDM Keuangan Menurut Ken Cole dan David Hoyle (2017) Dalam buku "*Management and Cost Accounting*," bahwa SDM Keuangan sebagai suatu pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada aspek keuangan dan akuntansi organisasi. SDM Keuangan mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja keuangan, perekrutan dan seleksi karyawan keuangan yang berkualitas, Kapasitas SDM dan pengembangan karyawan, serta manajemen kinerja dan kompensasi yang sesuai.

Alimbudiono & Fidelis (2004) menjelaskan kapasitas sumber daya manusia yang baik dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut yaitu:

- 1) Pengalaman yang baik
- 2) Pendidikan sesuai pekerjaan
- 3) Keterampilan sesuai tugas

Menurut Sutrisno (2010) Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti : *intelligence, creativity, dan imagination*. Maka yang akan dipergunakan untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- a) Pengalaman yang baik
- b) Pendidikan sesuai pekerjaan/Intelligence
- c) Keterampilan sesuai tugas

Beberapa ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) keuangan (Rivai, 2009):

1. Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan:
 - Tingkat pendidikan formal (misalnya, gelar sarjana atau pascasarjana) di bidang keuangan atau akuntansi.
 - Sertifikasi atau lisensi keuangan yang dimiliki oleh individu, seperti akuntan, auditor, atau profesional keuangan lainnya.
2. Pengalaman Kerja:
 - Jumlah tahun pengalaman kerja di bidang keuangan atau akuntansi.
 - Jenis pekerjaan dan proyek-proyek keuangan yang pernah dihadapi dan diatasi.
3. Keterampilan Teknis dan Manajerial:
 - Keterampilan dalam pengelolaan anggaran dan pengeluaran keuangan.
 - Kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan dan mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan.
 - Keterampilan manajerial dalam mengelola tim atau proyek keuangan.
4. Partisipasi dalam Pendidikan dan Pelatihan:
 - Tingkat partisipasi dalam Kapasitas SDM atau kursus yang berkaitan dengan keuangan atau akuntansi.
 - Keterlibatan dalam program pengembangan profesional di bidang keuangan.
5. Pengetahuan tentang Peraturan dan Standar Keuangan:
 - Pengetahuan tentang standar akuntansi yang berlaku, seperti *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) atau Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam konteks Indonesia.
 - Pemahaman tentang peraturan keuangan dan perpajakan yang berlaku di negara atau wilayah tempat SDM keuangan bekerja.

6. Ketersediaan Tenaga Ahli:

- Jumlah dan kualitas tenaga ahli keuangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan pemerintah atau organisasi.

Dengan mengukur kapasitas SDM keuangan, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

2.1.5.2 Indikator Kompetensi SDM Keuangan

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

- Pemahaman tentang prinsip akuntansi dan standar keuangan.
- Kemampuan dalam perencanaan dan penganggaran keuangan.
- Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan audit.

2. Keterampilan (*Skills*)

- Analisis data keuangan dan kemampuan menyajikan laporan keuangan.
- Kemampuan manajemen risiko dan pengelolaan portofolio.
- Penguasaan teknologi keuangan seperti software akuntansi.

3. Sikap dan Perilaku (*Attitude and Behavior*)

- Integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
- Kepatuhan terhadap kode etik profesi keuangan.
- Inisiatif dan inovasi dalam menyelesaikan masalah keuangan.

4. Kemampuan Teknis (*Technical Ability*)

- Kemampuan dalam melakukan audit internal dan eksternal.
- Penguasaan prosedur pembayaran, pencatatan, dan pelaporan.

- Keahlian dalam pengelolaan investasi dan pengukuran kinerja keuangan.

5. Kemampuan Non-teknis (*Soft Skills*)

- Komunikasi efektif untuk menjelaskan hasil analisis keuangan.
- Kemampuan kerja sama dalam tim lintas fungsi.
- Keterampilan dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan data keuangan.

Definisi dan indikator di sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menunjukkan pentingnya pengelolaan kompetensi SDM keuangan yang terpadu untuk mendukung keberhasilan organisasi.

2.1.6. Kinerja Keuangan

2.1.6.1 Defenisi Kinerja Keuangan

Istilah Kinerja adalah gambaran mengenai kemampuan atau tingkat pencapaian perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah tertuang dalam strategic planning perusahaan (Wahyuningsih & Widowati, 2016). Kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, yang paling mendasar dapat dilihat dari aspek keuangan dan juga aspek non-keuangan. Weston & Copeland (2010) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai "*indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham.*" Fokusnya adalah pada rasio keuangan dan pengembalian atas investasi. Menurut Sutrisno (2009) dalam Hutabarat (2020) kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja Keuangan adalah kinerja manajemen, yang merupakan perluasan nilai keuangan dan diperkirakan manfaatnya. Konsekuensi

dari memperkirakan penanda keuangan sangat penting sehingga mitra dapat memahami status fungsional perusahaan dan tingkat pencapaian perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan indikator dalam mengevaluasi dan mengukur kondisi keuangan perusahaan melalui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Pang et al., 2020). Kinerja keuangan perusahaan yang stabil merupakan daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan modal pada perusahaan, sehingga menjaga kestabilan kinerja keuangan menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai perusahaan. Kinerja keuangan dapat ditunjukkan melalui laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan perusahaan pada laporan keuangan merupakan perwujudan tanggung jawab manajemen kepada pemilik perusahaan dan sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan, serta sebagai bahan dalam pertimbangan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan (Wijaya, 2017).

Menurut Hery (2016) kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Bastian (Handayani, 2013), kinerja adalah penggambaran suatu tingkatan. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan/program/pendekatan untuk memahami tujuan, tujuan, misi, dan visi perhimpunan yang dituangkan dalam penyempurnaan rencana strategis perusahaan (*strategic plan*).

Menurut Fahmi (2017), kinerja perusahaan merupakan suatu analisis yang dilakukan guna mengetahui sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aturan

yang sudah ditetapkan terkait dengan penggunaan keuangan secara tepat dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.

Dari pemahaman beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah pencapaian perusahaan dalam periode yang menggambarkan kondisi kesejahteraan keuangan perusahaan dengan menggunakan tanda kecukupan modal, likuiditas, dan keuntungan. Dengan kinerja keuangan, perusahaan dapat lebih efektif mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada setiap periode tertentu, baik dalam hal peningkatan aset atau pengeluaran cadangan.

2.1.6.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut Hutabarat (2020) ada beberapa tujuan penilaian kinerja keuangan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas Penilaian kinerja keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu.
- 2) Mengetahui tingkat likuiditas Penilaian kinerja keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhi.
- 3) Mengetahui tingkat solvabilitas Penilaian kinerja keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik kewajiban keuangan jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

- 4) Mengetahui tingkat stabilitas usaha Penilaian kinerja keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutang perusahaan termasuk hutang pokoknya dengan tepat waktu, serta kemampuan perusahaan membayar dividen kepada para pemegang saham mereka.

Secara umum, pelaksanaan keuangan dapat dikatakan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan di bidang keuangan sebagian yang mencerminkan tingkat kesejahteraan perusahaan. Kemudian lagi, efek samping dari kinerja keuangan menunjukkan kekuatan desain keuangan perusahaan dan tingkat aksesibilitas sumber daya dari mana perusahaan dapat menciptakan manfaat. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman para eksekutif dalam mengawasi aset perusahaan secara produktif dan sukses.

2.1.6.3 Tahapan dalam pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2018), "ada beberapa tahap dalam pengukuran kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Review data laporan

Maksud dari perlunya mempelajari data secara menyeluruh adalah untuk meyakinkan pada penganalisis bahwa laporan sudah cukup jelas menggambarkan semua data keuangan yang relevan dan telah diterapkannya prosedur akuntansi maupun metode penilaian yang tepat, sehingga penganalisis akan betul-betul mendapatkan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan.

- 2) Menghitung

Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan,

persentase perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau teknik apa yang akan digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.

3) Membandingkan atau mengukur

Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya.

4) Menginterpretasi

Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil perbandingan/pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan

5) Solusi

Langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis. Dengan memahami problem keuangan yang dihadapi perusahaan akan menempuh solusi yang tepat.

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan menggunakan beberapa perangkat berwawasan. Dilihat dari caranya, penyidikan keuangan dapat dibagi menjadi (delapan) jenis, sebagaimana dikemukakan oleh Jumingan (2018), yaitu:

- a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (*absolute*) maupun dalam persentase (relatif)

- b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Hal yang membedakan antara kedua teknik ini adalah tahun atau periode pembandingan
- c. Analisis Persentase per Komponen, teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva seluruhnya
- d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan
- e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tertentu
- f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan
- g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi laba yang dibudjetkan dengan laba yang benar-bener dapat dihasilkan
- h. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi pada tingkat penjualan tersebut perusahaan belum memperoleh keuntungan.

Berdasarkan uraian pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara untuk melihat semua aktivitas keuangan perusahaan, apakah sudah mencapai target yang telah ditentukan perusahaan atau malah sebaliknya pada periode tertentu.